

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya, yang diukur berdasarkan kriteria teori implementasi, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Kajian ini menunjukkan ketidakmampuan Kelurahan Dr. Soetomo, Kota Surabaya dalam memberikan sosialisasi pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kinerja penjangkauan yang buruk dari tim pelaksana mengakibatkan banyak individu tidak menyiapkan dokumen secara lengkap, sehingga menghambat pelaksanaan komunikasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) secara penuh agar tidak dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Agar dapat berkomunikasi secara optimal dengan masyarakat, rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi mencakup sosialisasi kepada masyarakat dengan lebih merata dan menyeluruh.

##### **2. Sumber Daya**

Penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr. Soetomo, Surabaya, menunjukkan bahwa walaupun sumber daya

yang dimiliki termasuk anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur telah tersedia, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap optimalitas pelaksanaan program. Meskipun sumber daya telah digunakan, namun belum secara optimal meningkatkan kinerja dan keberhasilan pelaksanaan PTSL di masa mendatang. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan produktif dalam mendukung pelaksanaan program PTSL.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap positif yang dimiliki staf pelaksana PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo menjadi poin positif. Sikap baik ini memainkan peran penting dalam interaksi dengan peserta program dan dalam mengatasi kendala-kendala di lapangan. Disposisi atau sikap positif yang dimiliki staf pelaksana PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo menjadi nilai pendukung. Meskipun sudah terimplementasi, namun tetap diperlukan penguatan melalui pelatihan dan pengembangan sikap positif yang mendukung antar staf, agar kualitas interaksi dan respons terhadap kendala dapat ditingkatkan.

### 4. Struktur Birokrasi

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya sudah memiliki struktur birokrasi yang baik, namun belum cukup kuat. Tidak terimplementasinya faktor struktur birokrasi secara maksimal disebabkan oleh penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya dalam

menjalankan tugas keorganisasian. Oleh karena itu, diperlukan penilaian dan penguatan pada sistem penempatan pegawai agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal.

Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya telah dilakukan, namun belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kendala dalam sasaran kajian komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi yang kurang optimal, ketersediaan sumber daya yang belum optimal, serta struktur birokrasi yang perlu diperkuat. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, namun disposisi positif para pelaksana menjadi salah satu faktor penunjang yang penting dalam mencapai progres yang telah dicapai hingga saat ini. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan pada aspek-aspek yang menjadi fokus kajian, serta penguatan disposisi positif para pelaksana, menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dan kesuksesan implementasi program PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. Dengan demikian, upaya untuk terus memperbaiki dan memperkuat faktor-faktor tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan manfaat dan keberlanjutan program PTSL bagi masyarakat Kota Surabaya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah kelurahan dr. Soetomo yang perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya penyelesaian status kepemilikan tanah bagi pemilik yang belum jelas atau terlibat dalam sengketa. Pendataan yang lebih teliti diperlukan untuk menemukan pemilik yang valid, dengan memastikan data yang diperoleh berasal dari beberapa tahun yang lalu. Selain daripada itu, sosialisasi saat penyuluhan PTSL juga dapat memperbaiki komunikasi antar sesama pemerintah kelurahan dr. Soetomo, maupun antar pemerintah dan warga kelurahan dr. Soetomo. Sumberdaya dan disposisi juga akan membaik sehingga terbentuklah struktur birokrasi yang ideal di kelurahan dr. Soetomo.
2. Kepada BPN Kota Surabaya I perlu meningkatkan komunikasi antar staff bagian, dan juga komunikasi antar staff BPN Kota Surabaya I dan pemerintah kelurahan dr. Soetomo sehingga tercipta keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, penerapan teknologi informasi. Pemantauan berkelanjutan dan audit penggunaan anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi penyuluhan pelaksanaan PTSL juga harus dilakukan. Dengan demikian, maka struktur birokrasi antar BPN Kota Surabaya I dan pemerintah kelurahan dr. Soetomo akan terbentuk lebih baik dari sebelumnya.

3. Kepada masyarakat Kelurahan dr. Soetomo hendaknya mengikuti pelatihan dan sosialisasi penyuluhan pelaksanaan PTSL agar komunikasi dapat berkembang dan memperkuat sikap positif hubungan antara pemerintah setempat dengan warga sekitar, sehingga kualitas sumber daya dapat terus ditingkatkan, memastikan kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan program PTSL.
4. Perlu diadakannya penekanan yang lebih besar pada sosialisasi penyuluhan PTSL dan komunikasi dengan masyarakat, misalnya melalui berbagai media dan pendekatan yang lebih inklusif. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang sudah ada harus menjadi fokus utama. Hal ini mencakup penilaian yang cermat terhadap penggunaan dana, personil, sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa semua sumber daya tersebut digunakan secara efektif. Tidak lupa pengembangan sikap harus dipertahankan untuk menjamin interaksi dan solusi terhadap masalah agar cepat teratasi. Pada akhirnya, cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi sistem birokrasi adalah dengan menempatkan anggota staf sesuai dengan bidang keahlian mereka. Pelaksanaan program harus berjalan lebih efisien dengan penempatan staf berbasis kompetensi yang ditingkatkan dan kerangka kerja birokrasi yang diperkuat.